

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme dan prosedur pengajuan upaya hukum banding dalam perkara suap ini diatur dalam pasal 233-234 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam mengajukan permohonan banding disampaikan ke Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Dan dalam prosesnya harus memuat akta Pikir-pikir terdakwa, akta pernyataan banding, akta terlambat mengajukan pernyataan banding. Serta akta pencabutan banding
2. Pertimbangan hakim yang mengabulkan permintaan banding terdakwa kasus pemberian suap dalam putusan No.14/Pid.Sus/2021/TPK/PT.DKI bukan saja mengutip dari dakwaan versi penuntut melainkan adanya pertimbangan yuridis dan non yuridis, serta keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan

B. Saran

1. Menurut penulis, dalam memeriksa pada tingkat banding maka sebaiknya terdakwa maupun penasihat hukum harus benar-benar fokus pada memori banding yang merupakan substansi

pemeriksaan mengenai fakta-fakta dalam persidangan yang menjadi dasar pemeriksaan hakim banding.

2. Menurut Penulis, sebaiknya majelis hakim lebih teliti lagi bahwa bukan hanya fakta versi jaksa penuntut umum saja menjadi pertimbangan hakim, tetapi banyak keterangan lain yang bisa yang menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aprita, Serlika Rio Adhitya, Filsafat Hukum, Rajawali Pers, Depok,
- Atmasasmita, Romli, 2004. Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju
- Arto, Mukti Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Badriyah, Siti Malikhatun, 2016, Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic, Sinar Grafika, Jakarta
- Chazawi, Adami 2002, Pelajaran Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Penerbit Djambatan 198
- Dr. Alfitra, SH., MH, Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP,
- Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di luar KUHP, Kencana, Jakarta
- Farid, Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007
- Handoyono, Eko. Pendidikan Anti Korupsi. Ombak. Yogyakarta, 2013
- Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006

Kelsen, Hans 2018, Teori Umum Tentang Negara Dan Hukum (General Theory of Law and State), diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press

Nursya SH., MH, Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, Cv Alungadan Mandiri, 2017

Pangaribuan, Aristo M.A Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Rajawali Pers

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),

Rohim. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Multi Media, Depok

Saleh, Ruslan 1983, Pokok-Pokok Pikiran Pertanggungjawaban Pidana, Aksara, Jakarta

Soekanto, Soejono Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta Universitas Indonesia Press, 1986

S.R, Sianturi 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta:

Tirtaamidjaja, MH Pokok-pokok Hukum Pidana Jakarta: Fasco, 1955

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Wiyono, R. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 132

Wojowasito, S, 1999. Kamus Umum Bahasa Belanda Indonesia, PT Ichtiar Baru, Jakarta, Hlm. 128

JURNAL

Hidayat. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidana Korupsi. Vol 3. No.2. 2017

UNDANG-UNDANG

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

WEBSITE

<https://www.dppferari.org/tindak-pidana-korupsi-di-kalangan-pejabat-penyebab-dan-solusinya/>

<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/982/Joko%20P.%20Situmeang.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<https://kumparan.com/kumparannews/divonis-4-5-tahun-penjara-dikasus-suap-djoko-tjandra-ajukan-banding-1vXMY5HsXO8/2>

<https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/glosarium/tindak-pidana-umum/#:~:text=Tindak%20pidana%20umum%20adalah%20tindak,KUHAP%20sebagai%20sumber%20hukum%20formil.>

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id/proses-perkara-banding-pidana>

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-denganpenyuapan/3517diakses>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/>

